

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kurikulum yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat adalah Kurikulum 2013. Belum semua SMK di Kota Sorong menerapkan Kurikulum 2013. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya tenaga pendidik produktif dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Program pendidikan SMK di Kota Sorong masih mengembangkan program 3 tahun. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan anjuran Direktorat Pembinaan SMK. Beberapa siswa Jurusan Teknik Kendaraan Ringan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di industri jasa alat berat. Kurikulum 2013 SMK belum bisa diterapkan oleh semua sekolah yang ada di Kota Sorong.

Kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK tergolong sangat tinggi. Perusahaan dan industri memilih untuk menerima lulusan SMK dari luar Kota Sorong seperti dari Sulawesi, Maluku, dan Pulau Jawa. Perkembangan dunia usaha dan dunia industri yang begitu cepat menjadikan kebutuhan tenaga kerja meningkat di Kota Sorong. Beberapa sektor usaha dan industri mengalami peningkatan yang signifikan. Tuntutan kebutuhan akan tenaga kerja kompeten dan terampil terus mengalami peningkatan. Namun, tenaga kerja lokal belum bisa memenuhi kebutuhan permintaan tenaga kerja tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan tenaga kerja di Kota Sorong Provinsi Papua Barat masih tinggi dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan.

Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Lulusan SMK belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan ataupun industri yang ada di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Sebagian sekolah belum bisa menerapkan Kurikulum 2013 dengan alasan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, kompetensi dan kemampuan siswa yang belum mendukung, dan kurangnya guru produktif di masing-masing jurusan atau bidang

keahlian. Banyaknya lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan, lulusan yang dipersiapkan untuk bekerja lebih memilih untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi dengan anggapan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki, sebagian besar lulusan bekerja tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki menunjukkan irrelevansi kurikulum yang diterapkan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa kurikulum SMK belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Kerja (DUDI) di Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Sorong belum sepenuhnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Kompetensi kewirausahaan yang dikembangkan belum sepenuhnya terlihat secara nyata. Lulusan SMK kebanyakan bekerja tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melakukan pengkajian ulang penyelenggaraan SMK di Provinsi Papua Barat khususna di Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, peneliti merekomendasikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengevaluasi kembali pengadaan dan pengembangan SMK dengan mempertimbangkan aspek lokasi, keamanan, dan kebutuhan.
2. Pemerintah Provinsi Papua Barat supaya melakukan mediasi *partnership* atau kemitraan antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan perusahaan atau industri sehingga lulusan bisa langsung terserap.
3. Institusi pendidikan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan harus lebih memperhatikan relevansi penyelenggaraan SMK baik dari dimensi kebutuhan, lokasi maupun waktu.
4. Pemerintah harus bisa mendorong perusahaan atau industri khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menerima kerja sama, kemitraan dan

kolaborasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan baik dalam penyelenggaraan SMK ataupun untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.

5. Pendidikan Tinggi khususnya LPTK harus bisa menghasilkan guru produktif di sekolah kejuruan sehingga profesionalisme guru dalam mendukung penyelenggaraan SMK bisa lebih baik lagi.